BAB III

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTEK KERJA

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Unit Penyelidikan dan Pengukuran (UPP) DPU Propinsi DKI Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang penyelidikan, pengujian dan pengukuran tanah/ peil milik pemerintah DKI Jakarta. Dasar hukum pendirian UPP DPU DKI Jakarta adalah:

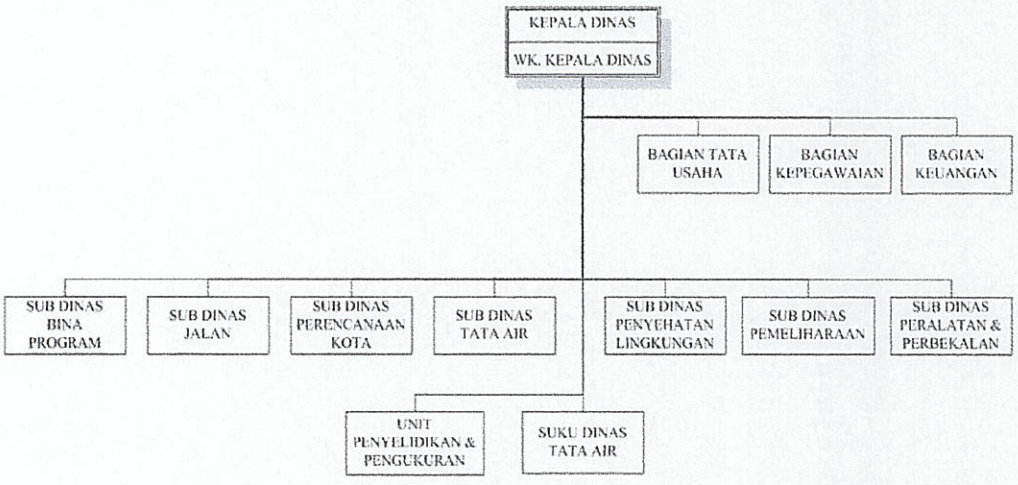
1. Surat Keputusan (SK) Gubernur KDKI Jakarta No. Daerah 10/1/46/1972 tentang penyempurnaan Struktur Organisasi DPU DKI Jakarta dimana timbul bagian baru antara lain Bagian P2DS (Bagian Penelitian, Pengembangan Dan Standarisasi) yang membawahi Seksi Laboratorium dan Seksi Pengukuran.
2. SK. Gubernur KDKI Jakarta No. BVII. 5/41/A/1/74 Bagian P2DS diubah menjadi Urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
3. SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 40 Tahun 1978 menerangkan timbulnya urusan Laboratorium dan Pengukuran yang merupakan gabungan dari Seksi Pengukuran dan Laboratorium.
4. Pada tahun 1985 semua urusan di lingkungan DPU DKI Jakarta diubah menjadi sebutan Sub Dinas, sehingga urusan Laboratorium dan Pengukuran berubah nama menjadi Sub Dinas Laboratorium dan Pengukuran.
5. Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 1989 tentang organisasi DPU DKI Jakarta. Perda ini menerangkan perubahan nama Sub Dinas

Laboratorium dan Pengukuran berubah nama menjadi Unit Penyelidikan dan Pengukuran (UPP).

6. Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Struktur Oraganisasi DPU DKI Jakarta yang mengatur pula tentang struktur internal UPP DPU DKI Jakarta.

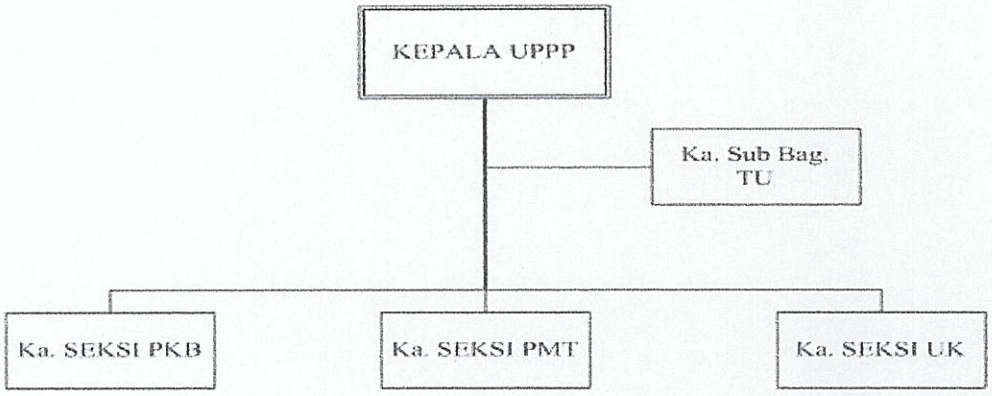
3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur eksternal Organisasi UPP dalam pemerintahan DKI Jakarta tertuang dalam Perda No. 2 Tahun 1999 diperlihatkan pada gambar 2.1. Dalam struktur ini terlihat bahwa UPP ada dibawah kendali Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Seluruh administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan ada dibawah kendali Kepala Dinas. Dari struktur ini dapat disimpulkan bahwa UPPP merupakan unit pelaksana teknis milik DPU DKI Jakarta.



Gambar 3.1 Struktur Eksternal Organisasi UPPP

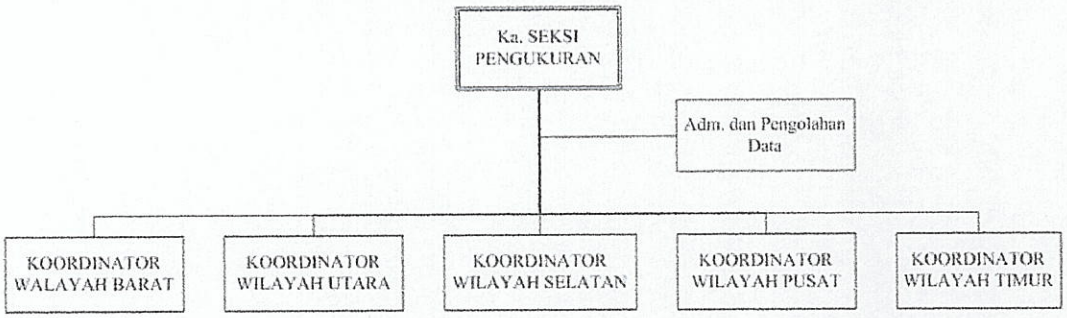
Struktur Internal Organisasi UPPP DPU DKI Jakarta sesuai Perda No.3 Tahun 2001 dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 3.2 Struktur Internal Organisasi UPPP

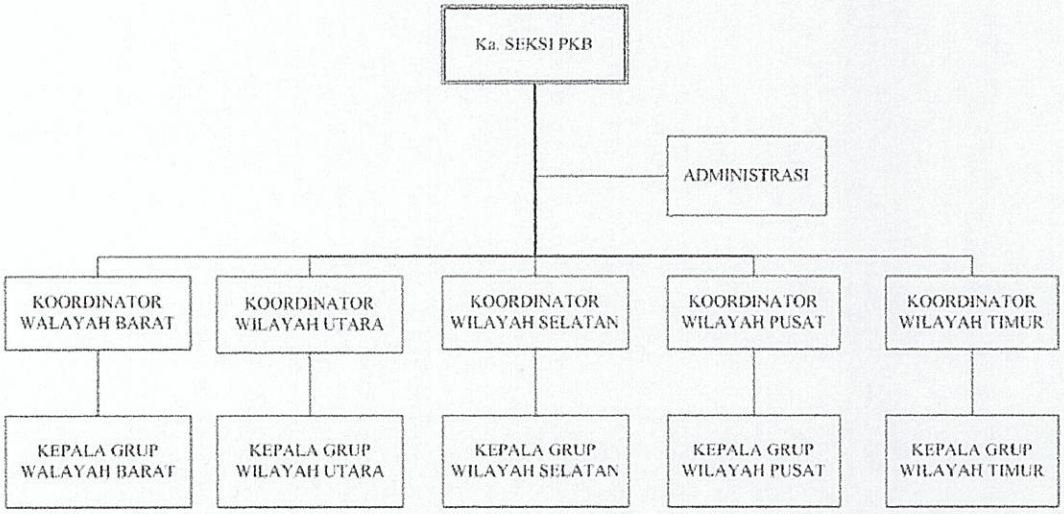
Gambar 2.2 memperlihatkan struktur lini dan staf yang berlaku di lingkungan UPPP. Struktur diatas menempatkan Kepala UPPP dalam fungsinya sebagai Manajer Eksekutif (SNI 19-17025-2000), dan menempatkan para kepala seksi dalam fungsinya sebagai manajer teknis, sedangkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat berfungsi sebagai Manajer Administrasi. Belum terlihat secara khusus fungsi Manajer Mutu dalam struktur organisasi ini. Masing-masing seksi mempunyai bagan organisasi yang berbeda. Seksi Pengukuran juga berbentuk lini dan staf. Pada setiap lini terdapat koordinator sesuai dengan pembagian kewilayahan DKI Jakarta, yaitu Koordinator Wilayah Barat, Koordinator Wilayah Utara, Koordinator Wilayah Selatan, Kordinator Wilayah Pusat, dan Koordinator Wilayah Timur. Setiap koordinator melakukan

koordinasi penugasan untuk lokasi pekerjaan pada wilayahnya masing-masing.



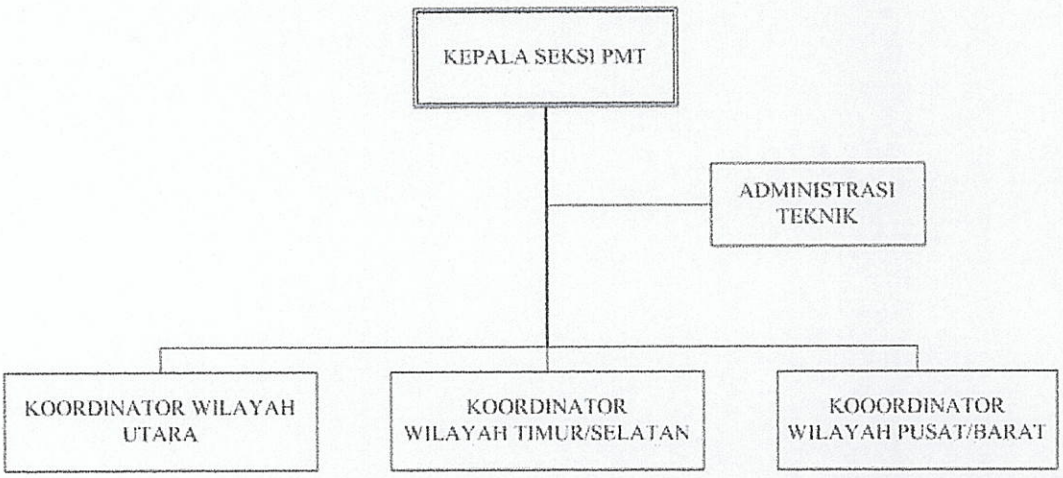
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Seksi Pengukuran UPPP

Seksi Penyelidikan Komponen Bangunan (PKB) mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:



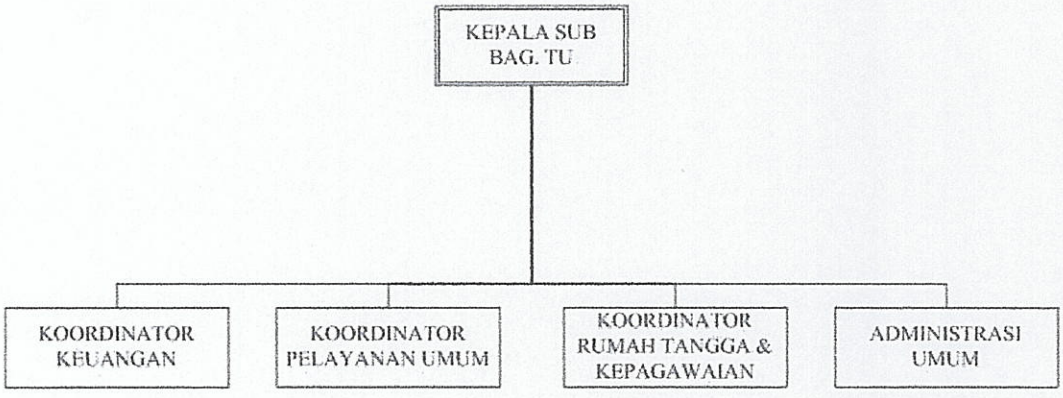
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Seksi PKB (Penyelidikan Komponen Bangunan)

Seksi Penyelidikan Mekanika Tanah (PMT) mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 3.5 Struktur Organisasi Seksi PMT (Penyelidikan Mekanika Tanah)

Untuk Sub Bagian Tata Usaha maka struktur organisasinya sebagai berikut:



Gambar 3.6 Struktur Organisasi Sub Bagian Tata Usaha UPPP

Menurut rencana, akan dilakukan perbaikan terhadap struktur organisasi UPPP. Dan pada saat ini upaya perubahan tersebut sedang diusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta unutk mendapatkan pengesahan.

3.3 Uraian Tugas

Semua kegiatan UPPP yang ada di wilayah DKI Jakarta dikoordinasikan oleh UPPP sebagai induknya.

Pembagian kerja UPP adalah sebagai berikut:

1. Sub Dinas Bagian Tata Usaha UPPP

   Sub Bagian ini bertugas menyelenggarakan administrasi UPPP termasuk mengelola Rumah Tangga, Sarana, dan Prasarana UPPP.

2. Seksi Pengukuran UPPP

   Seksi pengukuran bertugas melayani permintaan pengukuran geodesi, termasuk pengukuran profil dan situasi.

3. Seksi Penyelidikan Komponen Bangunan (PKB) UPPP

   Seksi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola laboratorium material dan melayani pengujian material konstruksi dan bangunan, termasuk beton dan aspal.

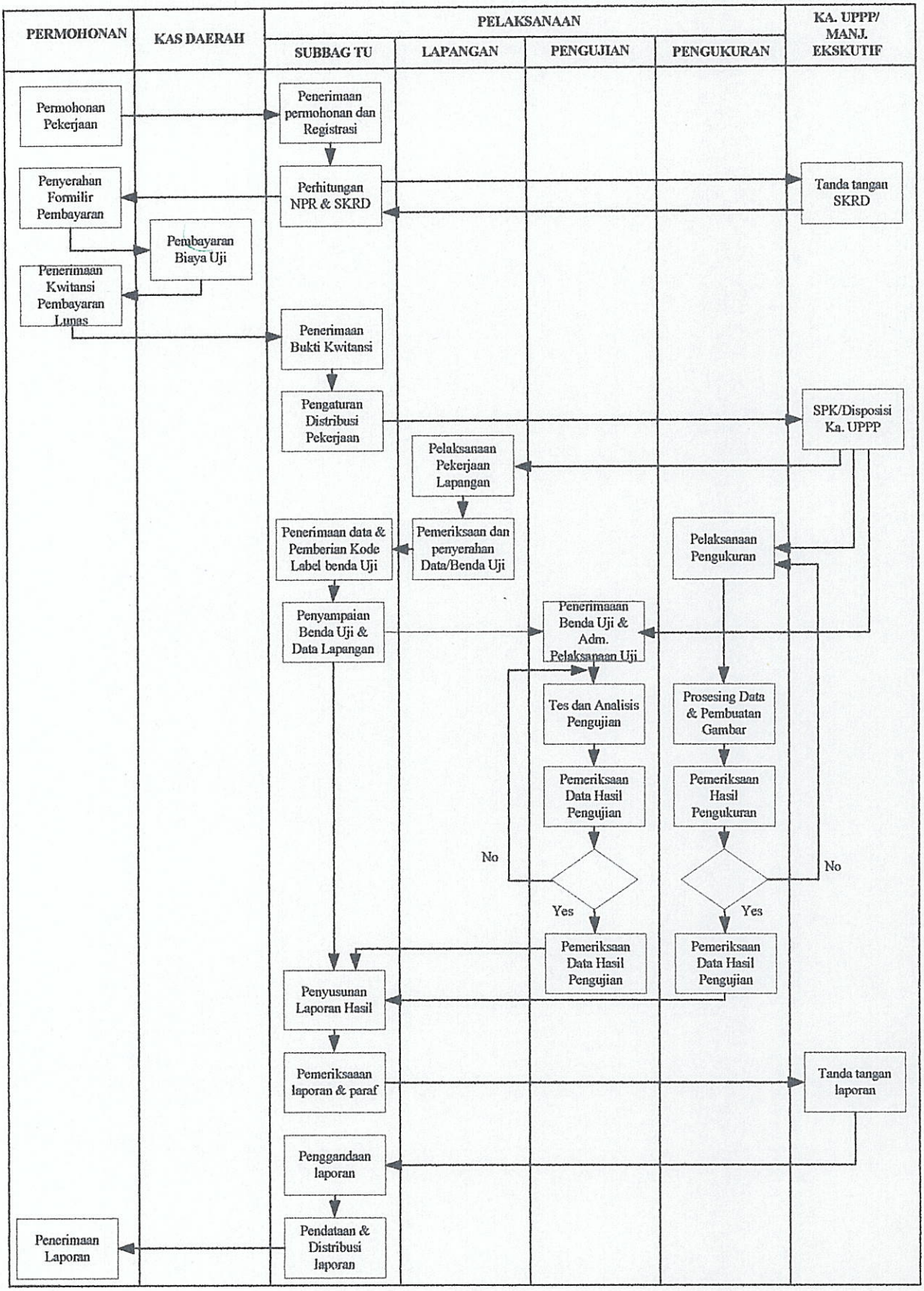
4. Seksi Penyelidikan Mekanika Tanah (PMT) UPPP

   Seksi ini bertugas mengelola laboratorium geoteknik dan melayani pengujian mekanika tanah, termasuk pengambilan sampel tanah, pengujian konsolidasi, triasial, maupun *direction*.

3.4 Prosedur Pelayanan Teknik UPPP

Sistem pelayanan teknik adalah sistem yang menjelaskan alur atau prosedur pelayanan UPPP. Sehingga hal ini akan memudahkan pelanggan untuk mengetahui proses atau kegiatan apa saja yang terjadi di UPPP.

ALUR PEKERJAAN PELAYANAN PELANGGAN YANG SEDANG BERJALAN



3.5 Aktivitas Yang Dilakukan Selama Kerja Praktek

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air merupakan bagian dari Dinas Pekerjaan Umum yang bergerak di bidang air. Tapi dalam pelaksanaan Kerja Praktek penulis ditempatkan di ruang khusus komputer sehingga memudahkan penulis untuk melakukan aktivitas.

Adapun aktivitas selama kerja praktek adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan data yang telah didapat.
2. Mengelompokkan data ke dalam data master.
3. Merealisasikan program kerja atau solusi yang telah dirancang pada tahap-tahap sebelumnya.
4. Membuat kuisioner untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen.
5. Menyelidiki aktivitas dan pekerjaan *user* dan memberikan rekomendasi untuk keperluan masa mendatang.
6. Memeriksa kesalahan atau *error* program yang telah dibuat oleh *programmer* (disini penulis tidak membuat program).
7. Membuat *user* manual sehingga *user* dapat menjalani dan memahami program yang dibuat.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM